

BAB II

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

2.1 Sejarah Krisis Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya telah menempati Myanmar sebelum merdeka tahun 1948. Mereka merupakan keturunan dari tentara maupun pedagang Arab, Turki atau Persia yang melakukan imigrasi ke Kerajaan Arakan yang kini dikenal dengan nama Rakhine.⁵⁶ Dipercaya pertama kali umat Islam datang ke Arakan pada abad ke-8 dan gelombang kedua kedatangan umat Islam di Arakan terjadi pada abad ke-15 dan diakhiri pada saat Arakan ditaklukkan Kerajaan Burma tahun 1784.⁵⁷ Pada kedatangan gelombang kedua ini para migrasi berasal dari Afghanistan, Persia, India Utara yang kemudian bergabung dengan imigran sebelumnya dan menciptakan dialek khas campuran antara bahasa Persia, Urdu, Pashto, Arakan, dan Bengali.

Rakhine berada di Myanmar Barat, berhadapan dengan Teluk Benggala dan mayoritas Etnis Rohingya menempati bagian utara Rakhine. Kerajaan Arakan berpusat di Mrauk U, terletak dekat Lembah Kaladan dan Lemro yang subur. Selama berabad-abad mereka hidup berdampingan dengan tentram, bahkan sebagian dari mereka bekerja di Kerajaan Arakan. Sebelum menjadi bagian dari

⁵⁶ Haradhan Kumar Mohajan, *History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims*, The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No. 1, hal. 28. <https://doi.org/10.22146/ikat.v2i1.37391> (12/13/24)

⁵⁷ *Ibid.*,

Uni Myanmar pada tahun 1948, wilayah Kerajaan Arakan pernah berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan, termasuk kerajaan bercorak Hindu dan Islam (dari abad ke-15 hingga 18), dan Kerajaan Buddhist.⁵⁸ Dulunya, sebelum penaklukan Burma tahun 1785, Kerajaan Mrauk U memiliki populasi umat Muslim lebih banyak dari umat Buddha.⁵⁹ Pada akhir abad ke-17, Kerajaan Arakan meredup yang mengakibatkan sebagian besar pedagang pergi dan menjadi daerah terpencil yang menjadi sarang bajak laut.⁶⁰

Lalu kerajaan tersebut dikuasai oleh Kerajaan Burma pada tahun 1784. Mereka mengusir keluarga Buddha, Muslim, dan Hindu terkemuka dari Mrauk U dan memindahkan mereka ke Amarapura, ibu kota.⁶¹ Dr. Francis Buchanan-Hamilton menjelaskan kelompok yang bermukim dalam jangka waktu lama di wilayah Arakan menyebut diri mereka sebagai 'Rooinga', sementara masyarakat asli Arakan lainnya yang menganut agama Buddha dikenal dengan sebutan Rakhine. Adanya perbedaan sebutan ini untuk membedakan antara minoritas muslim pribumi di Arakan (Rohingya) dan mayoritas Buddha (Rakhine).⁶² Di masa Kerajaan Burma yang dipimpin oleh Raja Bodawpaya inilah terjadi penganiayaan umat muslim pertama di Burma, karena ketakutan agama Islam akan menyebar di wilayah tersebut.

⁵⁸Arief Nurrachman, *rohingya sejarah dan asal-usulnya*, Kompaspedia, diakses dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya> (12/26/24)

⁵⁹ Jacques Leider, *Rohingya: The History of a Muslim Identity in Myanmar*, hal. 13. <https://www.networkmyanmar.org/ESW/Files/Leider-ORE.pdf> (12/26/24)

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 4

⁶¹ *Ibid.*, hal. 5

⁶²Rohingya Culture Center, *History of Rohingya*, rccchicago.org. <https://rccchicago.org/history-of-the-rohingya/> (12/13/24)

Kekuasaan jatuh pada kolonial Inggris setelah adanya beberapa perang.⁶³ Perang pertama terjadi di tahun 1824-1826, Inggris, yang telah menguasai India, khawatir akan adanya ekspansi Dinasti Konbaung ke Arakan dan Assam, yang berbatasan dengan Bengal.⁶⁴ Inggris memulai serangan dengan menguasai Arakan, Tenasserim, dan Martaban. Inggris mencoba menekan Burma melalui laut, namun pertempuran di darat sangat sengit. Hasil dari Perjanjian Yandabo (1826) mengakhiri perang dengan penyerahan Arakan, Tenasserim, dan Assam kepada Inggris. Lalu, Burma harus membayar banyak ganti rugi kepada Inggris. Ekonomi dan kekuatan tentara Dinasti Konbaung melemah karena perang tersebut. Charles Paton mengatakan bahwa ketika Inggris mengambil alih pada tahun 1825, 30% dari populasi adalah Muslim.⁶⁵

Perang kedua terjadi pada tahun 1852-1853, Inggris ingin mengambil alih perdagangan di Asia Tenggara, terutama di Delta Irrawaddy, yang memiliki banyak sumber daya strategis.⁶⁶ Ketegangan perdagangan di Rangoon (sekarang Yangon) yang membuat pedagang Inggris merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah Burma. Dengan itu, Inggris menyerang Rangoon dan Delta Irrawaddy, menguasai wilayah Bawah Burma (*Lower Burma*). Ekonomi Burma mengalami kerugian karena kehilangan sebagian besar wilayah pesisir pentingnya.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ National Army Museum, *Second Burma War*, diakses dalam <https://www.nam.ac.uk/explore/second-burma-war> (1/2/25)

⁶⁵ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 5

⁶⁶ National Army Museum, *Op. Cit.*

Dan perang ketiga terjadi di tahun 1885. Untuk menguasai Burma secara keseluruhan, Inggris ingin menghapus sisa-sisa Dinasti Konbaung.⁶⁷ Keputusan Raja Thibaw, raja terakhir Burma, untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Prancis, dianggap mengancam kepentingan Inggris, menyebabkan ketegangan. Pasukan Inggris berhasil menduduki ibu kota Burma, Mandalay, dalam waktu beberapa minggu. Burma dianeksasi sepenuhnya oleh Inggris dan menjadi bagian dari British India.

Selama berkuasa, banyak orang Bengali yang dikirim ke Rakhine oleh Inggris karena kurangnya populasi dan mereka diperintah untuk membantu mengembangkan pertanian. Sama halnya seperti klaim dari GoM (Government of Myanmar) adanya imigran dalam jumlah besar dari kaum Muslim ke Negara Bagian Rakhine untuk dipekerjakan sebagai buruh, pedagang, maupun menjadi administrator yang bertugas membantu pemilik tanah yang kaya.⁶⁸ Hal ini menyebabkan pergeseran besar dalam demografi dan meningkatkan konflik antara kelompok Rohingya dan Rakhine.⁶⁹

Hubungan antara kelompok etnis di Rakhine menjadi lebih buruk karena Inggris sering memanfaatkan perpecahan etnis untuk menguasai. Sebagai tanggapan terhadap penjajahan Inggris, nasionalisme Buddha mulai muncul. Militer Burma (Tatmadaw) dan para pendiri tentara, termasuk Aung San, dinaungi

⁶⁷National Army Museum, *Third Burma War*, diakses dalam <https://www.nam.ac.uk/explore/third-burma-war> (1/2/25)

⁶⁸Haradhan Kumar Mohajan, *History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims*, Vol. 2, No. 1, hal. 30-31. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/88186/> (1/2/25)

⁶⁹Diplomatic Council, *Recommendations to solve the Rohingya Crisis*, diplomatic-council.org. <https://www.diplomatic-council.org/node/97>, (11/13/24)

dan dilatih oleh militer kekaisaran Jepang selama masa kolonial untuk mengalahkan pasukan Sekutu dan kolonial Inggris.⁷⁰ Pemerintah kolonial mencatat sensus tahun 1881, 1891, 1911, 1921, dan 1931 yang menunjukkan adanya peningkatan populasi Muslim yang baru bermukim, mencapai 27% dari populasi.⁷¹

Inggris mundur ke India saat Jepang menyerbu Burma selama Perang Dunia II. Wilayah Arakan Burma dibagi selama tiga tahun (1942–1945). Jepang menguasai sebagian besar wilayah Buddha, dan tentara Inggris berada di utara dengan dukungan rekrutan Muslim lokal.⁷² Nasionalis Burma mendukung Jepang karena mereka berharap Inggris akan runtuh. Namun, kelompok etnis minoritas seperti Karen, Kachin, dan Rohingya pro-Inggris karena mereka didukung oleh Inggris selama kolonial. Akibatnya, terjadi kekerasan antara kelompok Muslim Rohingya dan kelompok Buddha Rakhine.⁷³ Muslim Rohingya mendapat perlakuan buruk dari Jepang seperti memenjarakan mereka. Situasi diperparah oleh Inggris karena mereka mempersenjatai Rohingya untuk melawan Jepang, yang menyebabkan konflik antar komunitas meningkat.⁷⁴

Jepang meninggalkan negara itu pada tahun 1945, dan Burma memerdekakan diri dari Inggris pada tahun 1948. Sekitar 90% penduduk Arakan berasal dari kelompok etnis Rohingya. Jumlah ini terus berkurang selama 49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar), karena disebabkan oleh pengusiran dan

⁷⁰ Haradhan Kumar Mohajan, *Op. Cit.*, hal. 20

⁷¹ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 6

⁷² Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 7

⁷³ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 31

⁷⁴ Rohingya Culture Center, *Op Cit.*

pembunuhan massal.⁷⁵ Para pemimpin Muslim Arakan Utara dari Maungdaw menyatakan bahwa Muslim Arakan adalah penduduk asli dan penduduk asli negara setelah Burma mendapat kemerdekaan pada tahun 1948.⁷⁶ Klaim etnis ini diajukan kepada otoritas Inggris dan Burma pada tahun 1947 dan 1948 dengan tujuan mendapatkan otonomi politik. Otoritas Inggris dan Burma menolak permintaan ini, sementara penduduk Buddha di daerah tersebut tidak menyukai Muslim yang aktif menyuarakan pandangan politik mereka. Di Arakan Utara, kegagalan pemberontakan Mujahid (1948-1961) dapat dikaitkan dengan pemerasan brutal oleh milisi lokal, ketidakpuasan tuan tanah lokal, dan perlakuan tidak adil terhadap Muslim oleh administrator Arakan.⁷⁷

Muslim Arakan berpartisipasi dalam pemilu 1947, 1951, 1956, dan 1960. Pada tahun 1951, mereka mengajukan tuntutan konstitusional untuk memiliki hak mereka secara resmi diakui dan dilindungi dalam rangka hukum dan konstitusi Myanmar, tetapi tidak mencapai hasil yang diinginkan.⁷⁸ Pada tahun 1956, Sultan Mahmud, seorang tokoh Muslim terkenal, diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Pengangkatannya dipandang sebagai tindakan praktis untuk mengurangi ketegangan politik. U Nu bergabung dengan Sultan Mahmud untuk melawan Organisasi Persatuan Nasional Arakan (ANUO), yang menginginkan negara etnis

⁷⁵ Syarif Hidayatullah, *Respon Negara Terhadap Pencari Suaka di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)*, Skripsi, Purwokerto: Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/15563/> (1/9/25)

⁷⁶ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 7

⁷⁷ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 8

⁷⁸ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 8

Arakan didirikan. U Nu merupakan pemimpin kemerdekaan Burma dan perdana menteri Myanmar dari tahun 1948 hingga 1958 dan 1960 hingga 1962.⁷⁹

Ne Win melakukan kudeta, membangun pemerintahan militer, dan memenjarakan U Nu pada Maret 1962.⁸⁰ Seorang jenderal yang memerintah Myanmar dari tahun 1962 hingga 1988. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Burma di bawah komando Jenderal Ne Win terhadap penduduk Rohingya, terutama tindakan militer untuk mengusir Rohingya secara paksa. Banyak pengungsi Bengali berlindung di Arakan, daerah yang juga dihuni Rohingya, saat perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Tahun 1977, otoritas militer dan imigrasi Burma melakukan Operasi Naga Min atau disebut dengan Raja Naga yang merupakan usaha nasional dengan tujuan mendaftarkan warga negara dan menyeleksi orang asing sebelum sensus nasional dilakukan.⁸¹

Akibat dari operasi tersebut, pemerintah Burma mengusir secara paksa lebih dari 200.000 Muslim, termasuk muslim Rohingya ke Bangladesh. Pemerintah Myanmar juga melakukan operasi kejam yang menghancurkan masjid, sekolah, monumen Islam, dan pembunuhan puluhan ribu muslim Rohingya. Tindakan ini menunjukkan diskriminasi Rohingya yang semakin parah pada saat itu.⁸² Nama

⁷⁹Amy Mckenna, *2021 Myanmar coup d'état*, Britannica, diakses dalam <https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat> (1/2/25)

⁸⁰Shu Maung, *U Ne Win*, Britannica, diakses dalam <https://www.britannica.com/biography/U-Ne-Win> (1/2/25)

⁸¹ Human Rights Watch, *BURMESE REFUGEES IN BANGLADESH*, diakses dalam <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/> (12/27/24)

⁸²Rohingya Culture Center, *Op Cit*.

negara itu ditetapkan sebagai Burma dalam Konstitusi 1947 namun, pada tahun 1989, junta militer mengubahnya menjadi Myanmar.⁸³

Konstitusi Myanmar dan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1948 memberikan kerangka kerja bagi Rohingya dan kelompok lain untuk mendapatkan hak kewarganegaraan Myanmar.⁸⁴ Presiden Myanmar pertama, Sao Shwe Thaik, dan perdana menteri kedua, U Ba Swe, keduanya mendukung klaim U Nu bahwa Rohingya adalah suku etnis dan berhak atas kewarganegaraan. Setelah kudeta tahun 1962, Ne Win menolak untuk mengesahkan dokumen resmi yang mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar, yang menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan hukum.⁸⁵ Pemerintah militer Myanmar mencabut hak kewarganegaraan nasional yang dikenal sebagai Naga Min (raja naga) pada tahun 1978.

Dibuatnya undang-undang baru yang mewajibkan semua orang di Negara Bagian Rakhine untuk mendapatkan izin sebelum dapat menikah.⁸⁶ Pemerintah mengklaim bahwa populasi Rohingya berkembang biak lebih cepat daripada tingkat yang diizinkan oleh organisasi internasional. Para pria harus mencukur jenggot mereka untuk foto surat izin menikah, dan wanita Rohingya dilarang mengenakan penutup kepala atau wajah yang bersifat keagamaan sebelum

⁸³ Gempita Surya, *Kenapa Burma Berubah Jadi Myanmar*, KompasTV, diakses dalam <https://www.kompas.tv/klik360/154765/kenapa-burma-berubah-jadi-myanmar-ini-penjelasan> (12/26/24)

⁸⁴ MD. Khalid Rahman & Md. Khalid Amin, *Rohingya Persecution in Myanmar and Thoughts on Repatriation: Evidence From Rohingya Refugee Camps in Bangladesh*, vol. 21, no. 24, hal. 694. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1778> (27/12/24)

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 33

mendapatkan surat izin menikah. Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata Myanmar disebut sebagai pendukung utama dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penghilangan secara paksa, penahanan dengan semaunya, penyiksaan, hingga perbudakan seksual, kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekejaman lainnya.⁸⁷

Pada kekuasaan Pemerintah Jenderal Ne Win memberlakukan hukum Burma pada tahun 1982. Tidak ada undang-undang yang memberikan status kepada Rohingya sebagai kelompok minoritas Myanmar, yang berarti mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki negara.⁸⁸ Pemerintah Myanmar melanggar hak asasi manusia terhadap kelompok Rohingya, termasuk pelanggaran dalam hal kemudahan ke layanan kesehatan, kelayakan rumah, pendidikan, dan kekerasan fisik ke perempuan dan anak yang menyebabkan banyak orang Rohingya melarikan diri ke negara lain. Dokumen tersebut menyebutkan 135 kelompok etnis yang sudah menetap di Burma sebelum 1823, tetapi tidak mencantumkan Rohingya. Inggris mengambil alih Burma setelah perang pertama Inggris-Burma pada tahun 1823.⁸⁹ Pemerintah menganggap imigrasi yang datang dari pendudukan Inggris ke Burma dianggap bukan penduduk asli Burma dan oleh karena itu ilegal.

Adanya perbedaan antara undang-undang di tahun 1982 dengan tahun sebelumnya. Perubahan dalam hukum kewarganegaraan Myanmar yang sangat

⁸⁷ Human Rights Council, *Economic interests of the Myanmar military*, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military> (12/28/24)

⁸⁸ Aprianti Ranty, dkk, *Durable Solutions Bagi Pengungsi Etnis Rohingya Tanpa Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional*, *Balobe Law Journal*, vol. 4, No. 1, hal 27. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2026> (12/13/24)

mempengaruhi status kelompok seperti Rohingya. Untuk mendapatkan kewarganegaraan, undang-undang kewarganegaraan tahun 1948 memasukkan pernikahan dengan warga negara, dinas militer, atau tinggal selama lima tahun.⁹⁰ Seorang anak yang lahir di Myanmar, kedua orang tuanya lahir di sana, dan kakek-neneknya adalah penduduk tetap Myanmar secara otomatis memiliki kewarganegaraan.⁹¹ Namun, cara tersebut dihapuskan pada tahun 1982. Menurut undang-undang baru, hanya dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau seseorang dengan berasal pada keluarga dari orang tua berstatus warga negara. Tidak ada cara untuk mendapatkan kewarganegaraan setelah 1982 kecuali dengan pemberian khusus oleh pemerintah. Kemudian, etnis Rohingya berhasil diberikan surat keterangan pendaftaran sementara dan kartu tanda penduduk, meskipun tidak memberikan status hukum yang lebih permanen.⁹²

Dalam undang-undang 1982, warga negara Myanmar memiliki tiga jenis hak yang berbeda: warga negara penuh, yang merupakan keturunan orang yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823; warga negara asosiasi, yang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan undang-undang tahun 1948; dan warga negara yang dinaturalisasi, yang merupakan keturunan individu yang menetap di wilayah Myanmar sebelum tahun 1948 tetapi tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan berdasarkan undang-undang tersebut.⁹³ Nasionalisme Burma dan

⁸⁹ Rohingya Culture Center, *Op Cit.*

⁹⁰ Myanmar, *The Union Citizenship Act, Act No. LXVI of 1948*, Articles 7, 13, and 11, [ICC Legal Tools Database | The Union Citizenship Act 1948](#) (12/13/24)

⁹¹ *Ibid.*, Article 4(2)

⁹² Ken MacLean, *The Rohingya Crisis and the Practices of Erasure*, *Journal of Genocide Research*, vol. 21, no. 1. hal. 7 <https://doi.org/10.1080/14623528.2018.1506628> (12/13/24)

⁹³ *Ibid.*, hal. 6

praktik Buddhisme Theravada digabungkan untuk memperkuat otoritas pemerintah selama pemerintahan militer Myanmar.⁹⁴ Kelompok minoritas Rohingya, Kokang, dan Panthay mengalami pelecehan. Dengan orasi yang memecah belah, pemerintah mendorong gagasan bahwa Myanmar adalah tanah khusus bagi umat Buddha Burma.

Status kewarganegaraan bagi setiap individu sangat penting untuk mendapatkan hak-hak karena berfungsi sebagai dasar untuk pengakuan dan akses ke berbagai hak tambahan. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat memanfaatkan hak pilihnya. Ia tidak dapat mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perjalanan internasional; melamar pekerjaan, dan menghadapi sistem peradilan, bahkan mereka merasa tidak aman.⁹⁵ Mereka yang tanpa kewarganegaraan tidak hanya tidak setara di hadapan hukum, tetapi juga tidak memiliki hukum yang berlaku bagi mereka.

Rezim militer membuat Konstitusi baru pada tahun 1974, yang mengakui 135 ras, namun Rohingya tidak dimasukkan ke dalam daftar.⁹⁶ Parlemen mengesahkan Undang-Undang Imigrasi Darurat, yang mengharuskan semua warga negara untuk membawa kartu identitas yang disebut Kartu Registrasi Nasional atau National Registration Certificate (NRC). Namun, diputuskan bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan NRC, dan mereka diberikan Kartu

⁹⁴ Rohingya Culture Center, *Op Cit.*

⁹⁵ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 23

⁹⁶ Verena Hölzl, *Identity and belonging in a card: How tattered Rohingya IDs trace a trail toward statelessness*, *The New Humanitarian*, diakses dalam <https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2018/03/01/identity-and-belonging-card-how-tattered-rohingya-ids-trace-trail-toward> (1/1/25)

Registrasi Luar Negeri atau Foreign Registration Cards (FRC).⁹⁷ Myanmar membuat Kartu Pengawasan Warga Negara (CRC) pada tahun 1989, yang terdiri dari tiga kartu warna: kartu merah muda yang menunjukkan status sebagai warga negara penuh, kartu biru diberikan kepada warga negara asing, dan kartu hijau menandakan warga negara yang dinaturalisasi. Tidak ada kartu yang diberikan kepada Rohingya.⁹⁸ Dengan dukungan UNHCR, pemerintah Myanmar mengeluarkan Kartu Registrasi Sementara (TRC) berwarna putih pada tahun 1995 untuk orang Rohingya. Kartu putih ini pada akhirnya dicabut pada awal 2015. Akibatnya, orang Rohingya kehilangan hak pilih serta hak asasi manusia mereka di Myanmar.

Myanmar memiliki banyak ras yang berbeda, dengan mayoritas penduduknya adalah orang Burma, yang merupakan 68% dari populasi, dan Rohingya, yang hanya 4%.⁹⁹ Orang Burma menempati di wilayah tengah negara ini. Kelompok etnis lain (Kachin, Chin, Rakhine, Shan, dan lainnya), tinggal di daerah perbatasan. Ada delapan kelompok muslim utama di Myanmar.¹⁰⁰ Pertama, Suku Rohingya (kelompok terbesar yang mayoritas tinggal di Negara Bagian Rakhine). Kedua, Umat Muslim India yang dari Asia Selatan. Ketiga, Suku Panthay (orang-orang Muslim Tionghoa tinggal di perbatasan Burma-Tiongkok di bagian utara Myanmar). Keempat, Suku Kaman (keturunan dari putra Kaisar Mughal

⁹⁷ Md Mahbubur Rahman, *Statelessness – the Root Cause of the Rohingya Crisis – Needs to Be Addressed*, hal. 26, diakses dalam <https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/statelessness-the-root-cause-of-the-rohingya-crisis-needs-to-be-addressed/> (1/1/25)

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Warzone Initiative, *Rohingya Briefing Report*, Equal Rights Trust, hal. 4, diakses dalam <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Rohingya%20Briefing%20Report.pdf> (1/3/25)

¹⁰⁰ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 29

Shahajan yang bernama Shah Suja, memiliki sekitar 300.000 penduduk). Kelima, Suku Tambukia (mereka yang berasal dari Arab diberi izin tinggal di Arakan selatan oleh Raja MahaTaing Chandra). Keenam dan Ketujuh ada Suku Turki dan Pathan (bertempat di Mrohaung, tiba di Arakan pada abad ke-15 saat Raja Min Soa Muwn memerintah). Kedelapan, Suku Zerbadee (suku yang berasal dari perkawinan campuran, terutama ayah Muslim dan ibu Burma).

Di Negara Bagian Rakhine sendiri ada 2 kelompok Muslim utama, Kaman dan Rohingya yang keduanya memiliki perbedaan.¹⁰¹ Muslim Kaman, mereka berbicara dalam bahasa Rakhine atau Burma dan memiliki kesamaan dalam adat dan budaya dengan masyarakat beragama Buddha. Maka dari itu mereka mendapat pengakuan dan diberi kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Sedangkan Rohingya, mereka berbicara dengan bahasa Rohingya, yang hampir mirip dengan bahasa Chittagonian Bangladesh. Orang Rohingya dan Chittagonian memiliki penampilan secara fisik yang serupa. Hampir semua suku Rohingya tinggal di pesisir barat Negara Bagian Rakhine. Mereka tidak boleh meninggalkan daerah tersebut tanpa izin dari pemerintah Myanmar.

Peristiwa selanjutnya, pada tahun 2012, terdapat konflik komunal yang melibatkan dua pihak, yaitu umat Buddha dari Rakhine dan Rohingya. Konflik ini telah mengakibatkan korban jiwa dari kedua belah pihak yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah.¹⁰² Situasi ini

¹⁰¹ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 30

¹⁰² Md. Khalid Rahman and Md. Khaled Amin, *Rohingya Persecution in Myanmar and Thoughts on Repatriation: Evidence from Refugee Camps in Bangladesh*, Indonesian Journal of International Law, vol. 21 no. 4 <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1778> (12/13/24)

menyebabkan kematian, kekerasan terarah terhadap Rohingya seperti penangkapan maupun pembakaran desa mereka, dan juga mendorong banyak etnis Rohingya untuk keluar dari Myanmar guna mendapat pengamanan dari negara-negara tetangga, seperti Indonesia.

Di tahun sebelumnya, 2011, muncul gerakan 969 yang terkenal di kota selatan Mawlamyine. Dibentuk oleh biksu Buddha ekstrem Ashin Wirathu, bahkan ia dijuluki sebagai “Bin Laden Burma”.¹⁰³ Gerakan 969 merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi budaya yang berkaitan dengan agama Buddha di beberapa negara Buddha. "Gerakan ini pertama kali dirujuk dalam sebuah buku karya U Kyaw Lwin, yang saat itu menjabat sebagai pejabat publik di Kementerian Agama pada tahun 1990-an.¹⁰⁴ Dalam buku ini, ada hubungan antara Tiga Permata (Tiratana) dan Buddha. Ekstremis Buddha mengklaim bahwa agama tersebut tidak mengizinkan tindakan kriminal atau berdosa, kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, atau perbudakan wanita. Gerakan ini berkembang pesat menjadi simbolisme nasional di Myanmar. Stiker dengan logo 969 dipasang secara gratis di banyak tempat, seperti toko, mobil, halte bus, dan rumah.¹⁰⁵

¹⁰³ Ardi Priyatno Utomo, *Junta Militer Myanmar Bebaskan Biksu Berjuluk Buddhist bin Laden*, Kompas, diakses dalam <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/07/095958970/junta-militer-myanmar-bebaskan-biksu-berjuluk-buddhist-bin-laden> (12/27/24)

¹⁰⁴ Haradhan Kumar Mohajan, *Op Cit.*, hal. 34

¹⁰⁵ International Crisis Group, *Buddhism and State Power in Myanmar*, diakses dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/290-buddhism-and-state-power-myanmar> (12/27/24)

2.2 Awal Mula Kedatangan dan Peningkatan Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia

Saat krisis di Myanmar meningkat, tepatnya setelah tahun 2012, banyak di antara mereka yang mencari perlindungan di negara-negara sekitar, termasuk Indonesia. Larinya mereka ke Indonesia bukan sebagai negara tujuan, namun sebagai negara transit. Australia menjadi negara tujuan mereka. Beberapa dari mereka keluar dari kamp Bangladesh karena mereka berharap memperoleh kualitas hidup yang lebih baik di negara lain, termasuk Indonesia.¹⁰⁶ Terlihat dalam jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia yang mengalami kenaikan drastis dari 222 pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2012 meningkat menjadi 781 pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2013.¹⁰⁷ Pada Bulan Juni, kekerasan sektarian dimulai dengan tiga pria Muslim memperkosa seorang wanita Arakan berusia 28 tahun di Kotapraja Ramri.¹⁰⁸ Pada bulan yang sama, sekelompok besar penduduk desa Arakan di kota Toungop, menghadang bus dan membunuh sepuluh Muslim yang berada di dalamnya. Meningkatnya kekerasan antara umat Buddha (Arakan) dan Rohingya menyebabkan pembunuhan dan pembakaran di kedua belah pihak. Ribuan orang meninggalkan rumah mereka dan populasi kedua komunitas mengalami kerusakan.

¹⁰⁶ Sultan Abdurrahman, dkk., *Kapolri Sebut Pengungsi Rohingya Hanya Transit di Indonesia*, Tempo.co, diakses dalam <https://www.tempo.co/politik/kapolri-sebut-pengungsi-rohingya-hanya-transit-di-indonesia-112314> (12/26/24)

¹⁰⁷ UNHCR, *Refugee Data Finder*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics> (15/12/24)

¹⁰⁸ Human Rights Watch, *Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, hrw.org <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims> (12/17/24)

Meskipun pasukan keamanan negara tidak melakukan apa pun untuk menghentikan kekerasan pada awalnya, mereka dengan cepat bergabung dengan massa Arakan untuk menyerang dan membakar desa dan lingkungan Muslim.¹⁰⁹ Pejabat partai politik Arakan dan biksu Buddha senior secara terbuka menjelek-jelekan penduduk Rohingya dan menggambarkan mereka sebagai ancaman bagi Negara Bagian Arakan, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada bulan Oktober jelas telah direncanakan dan direncanakan jauh lebih dahulu. Pada tanggal 23 Oktober, ribuan pria dari Arakan menyerbu dan menyerang desa-desa Muslim di Myanmar. Mereka membawa senjata seperti parang, pedang, senjata rakitan, bom molotov, dan lainnya. Pasukan keamanan negara tidak mengambil tindakan atau terlibat langsung dalam kekerasan ini.¹¹⁰

Presiden Thein Sein pada bulan Juni meminta agar orang Rohingya yang ilegal dikirim ke negara ketiga, meskipun sebagian besar orang Rohingya telah tinggal di Burma selama beberapa generasi, tetap tidak mendapat status hukum formal.¹¹¹ Thein Sein membentuk komisi investigasi yang terdiri dari 27 orang pada 17 Agustus.¹¹² Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran di balik kerusuhan dan menemukan solusi bagi masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda untuk hidup bersama secara harmonis. Namun, sejak bulan Juni, tidak ada tindakan signifikan yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban atas kekerasan

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² Christina Szurlej, *Preventing Genocide Against The Rohingya Muslim Minority in Myanmar*, genocidewatch.com, diakses dalam <https://www.genocidewatch.com/single-post/2019/12/11/a-2015-genocide-warning-applying-stantons-10-stages-to-the-rohingya-of-myanmar> (12/17/24)

tersebut atau mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam kekerasan sektarian yang lebih lanjut.

Tindakan lain dalam rangka menyebarkan kebencian terhadap Muslim Rohingya yaitu adanya Gerakan 969 yang dicetuskan oleh Biksu Wirathu, seorang biksu Buddha yang terkenal dengan pidato-pidatonya yang menantang dan anti-Muslim. Tiga angka yang dianggap suci dalam ajaran Buddha disebut dengan "969". Angka 9, 6, dan 9 masing-masing melambangkan atribut Buddha, Dhamma, dan Sangha. Simbol 969 ini juga tersebar luas dan ditempelkan di banyak tempat. Lambang 969 juga banyak ditempel di banyak tempat, antara lain pada mobil, transportasi umum, toko, dan kios cinderamata.¹¹⁴

Konflik yang terjadi antara komunitas Buddha dan Muslim di tahun 2012 tersebut memiliki dampak panjang dan menambah pandangan kebencian lebih terhadap komunitas Muslim di Myanmar. Meningkatnya sentimen anti-Muslim ini berujung pada kerusuhan dan kerusakan besar di lingkungan Muslim yang memakan korban sebanyak 44 orang di tahun 2013, dan juga mengakibatkan adanya peningkatan pesat kelompok Muslim yang melakukan perjalanan berbahaya dengan perahu dari Rakhnie ke negara-negara lain di wilayah tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Yudhistira Dwi Putra, *deretan fakta tentang SKUAD969, gerakan buddha radikal biang kerokkonflik myanmar*, <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/05/337/1769196/deretan-fakta-tentang-skuad-969-gerakan-buddha-radikal-biang-kerok-konflik-myanmar> (15/12/24)

¹¹⁵ International Crisis Group, *The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar*, crisisgroup.org. diakses dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/dark-side-transition-violence-against-muslims-myanmar> (12/14/24)

Kerusuhan lain terjadi akibat dari konflik sebelumnya di tahun 2013, yang disebut dengan Konflik Mandalay yang menewaskan seorang warga Buddha dan seorang warga Muslim.¹¹⁶ Ketegangan antar agama di negara tersebut tergambar melalui kerusuhan antara kelompok Buddha dan Muslim, yang kemudian memicu aksi protes serta serangan terhadap komunitas Muslim di Mandalay. Pemerintah mengambil tindakan dengan diberlakukannya jam malam di Mandalay, rentang waktu dari jam 21.00 hingga 05.00 waktu setempat dan kelompok yang terdiri dari lebih dari lima orang dilarang masuk.¹¹⁷

Maret 2014, sehari sebelum sensus nasional pertama di Myanmar sejak tahun 1983, pemerintah gagal memenuhi janjinya untuk memberikan kesempatan kepada warga Rohingya untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Sebaliknya, pemerintah mengatakan bahwa orang-orang harus mendaftar sebagai "Bengali" atau mereka tidak akan dihitung. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya menghilangkan Rohingya dari sensus.¹¹⁸ Pada Bulan Oktober 2014, pemerintah mengumumkan Rencana Aksi Negara Bagian Rakhine, yang akan memperparah segregasi dan diskriminasi Rohingya dan memicu gelombang baru pelarian kapal.¹¹⁹ Jumlah etnis Rohingya diperkirakan ada lebih dari 1 juta setelah dilakukannya sensus di tahun 2014.¹²⁰ Sebagian besar dari mereka bertempat di

¹¹⁶ BBC Indonesia, *kerusuhan myanmar berlanjut dua tewas*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140703_myanmar_islam_buddhis (12/14/24)

¹¹⁷ Antara News, *Jam Malam Diberlakukan di Mandalay, Myanmar*, [antaranews.com https://www.antaranews.com/berita/442486/jam-malam-diberlakukan-di-mandalay-myanmar](https://www.antaranews.com/berita/442486/jam-malam-diberlakukan-di-mandalay-myanmar) (12/14/24)

¹¹⁸ Amnesty International, *Myanmar*, [amnesty.org https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/](https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/) (12/17/24)

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Jacques Leider, *Op. Cit.*, hal. 2

Maungdaw, Buthidaing dan Rathedaung yang berlokasi di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh. Mereka menyusun sekitar sepertiga dari total populasi Negara Bagian Rakhine, yang jumlahnya lebih dari 3 juta, sementara satu juta lainnya tinggal di luar Myanmar.

Terlepas dari fakta bahwa konflik komunal yang terjadi pada Bulan Juli 2014 di Mandalay yang mengakibatkan kematian dua orang, banyak orang berpendapat bahwa peristiwa tersebut menunjukkan kekompakan sosial di kota tersebut.¹²¹ Menyusul unggahan media sosial yang menghasut oleh U Wirathu, kelompok masyarakat, pemimpin agama, dan warga dimobilisasi untuk meredakan ketegangan dan memerangi upaya pihak luar untuk memicu konflik. Pengumuman tersebut menuduh pemilik kedai teh Muslim memperkosa seorang wanita Buddha, tetapi ternyata tidak benar. Presiden U Thein Sein berterima kasih kepada penduduk Mandalay dalam pidato radio pada 7 Juli 2014 karena telah mencegah penyebaran kekerasan di kota meskipun ada upaya dari pihak yang ingin memicu konflik.¹²² Mandalay disebut sebagai masyarakat teladan di mana hubungan antarumat beragama telah berlangsung secara harmonis selama puluhan tahun.

Ketegangan kondisi bagi etnis Rohingya di Myanmar berlanjut di tahun 2015 dengan adanya pemberhentian kartu putih oleh Presiden Thein Sein.¹²³ Ini alasan etnis Rohingya kabur dari Myanmar. Kartu putih tidak diberlakukan pada

¹²¹Mratt Kyaw Thu, *The Burmese Muslims of central Myanmar: No beards, no kurtas*, frontiermyanmarnet.com <https://www.frontiermyanmar.net/en/the-burmese-muslims-of-central-myanmar-no-beards-no-kurtas/> (12/17/24)

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Pamela Sarnia, *Ini Alasan Kamun Rohingya Kabur dari Myanmar*, news.okezone.com <https://news.okezone.com/read/2015/05/23/18/1154199/ini-alasan-kaum-rohingya-kabur-dari-myanmar> (12/14/24)

tanggal 31 Maret, dan menarik seluruh kartu putih Rohingya pada 31 Mei. Dengan ditariknya kartu putih ini membuat mereka tidak mendapatkan hak untuk ikut pemilu. Hal ini juga dilakukan karena ada aksi protes yang dilakukan oleh komunitas Buddha atas ketidaksetujuan mereka pada hak pilih bagi pemegang kartu putih.¹²⁴ Selain itu, adanya hasutan dari seorang politikus yang mengajak massa dalam demonstrasi untuk melakukan "bunuh dan kubur" pada semua orang Rohingya dan pernyataan ini disambut dengan baik oleh massa.¹²⁵

Gambar 2.1 Kartu Putih (kartu identitas) Rohingya¹²⁶



Krisis Rohingya dilanjut pada tahun 2016 hingga 2017 dengan permasalahan yang serupa. Diawali dengan penyerangan ke pos polisi yang bertempat di sepanjang perbatasan Myanmar dan Bangladesh oleh pasukan

¹²⁴BBC News, *Myanmar Mencabut Hak Pilih Warga Rohingya Setelah Protes*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-31421179> (12/14/24)

¹²⁵ Mirco Kreibich, *et. al.*, *Myanmar's Religious and Ethnic Conflicts: no end in sight*, boell.de https://www.boell.de/en/2017/05/24/myanmars-religious-and-ethnic-conflicts-no-end-sight#_ftn20 (12/14/24)

¹²⁶ Minanews, *Sebanyak 20.000 Warga Rohingya Pemegang Kartu Putih Dikeluarkan dari Parpol*, diakses dalam <https://minanews.net/sebanyak-20000-warga-rohingya-pemegang-kartu-putih-dikeluarkan-dari-parpol/> (6/16/25)

ARSA.¹²⁷ ARSA sebelumnya dikenal dengan berbagai nama Harakah al-Yaqin, beroperasi di wilayah Rakhine yang terletak di bagian utara Myanmar, tempat sebagian besar komunitas Rohingya menganut agama Islam yang mengalami penganiayaan.¹²⁸ Pemerintah menyatakan serangan 25 Agustus itu dilakukan dengan pisau dan beberapa bom buatan.

Ataullah Abu Amar Jununi, selaku pemimpin ARSA, menyampaikan bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk membela hak-hak, menjamin keselamatan, serta memberikan perlindungan bagi etnis Rohingya dari penindasan negara berdasarkan prinsip membela diri. Dikatakan juga bahwa mereka tidak ada hubungan dengan kelompok teroris transnasional seperti ISIS, Al-Qaeda, dll. Menurut laporan Amnesty International, setelah kekerasan yang terjadi pada bulan Agustus-Oktober 2017, militer mungkin telah membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan mereka mengejar ARSA, tetapi kekerasan tersebut dilakukan terhadap seluruh desa Rohingya tanpa pandang bulu. Pemerintah mengklaim bahwa kekerasan tersebut termasuk "pertempuran" dengan ARSA daripada kekerasan terhadap warga sipil.¹²⁹

¹²⁷ The New Humanitarian, *The Rohingya: The exodus isn't over, A humanitarian emergency decades in the making*, thenewhumanitarian.org <https://www.thenewhumanitarian.org/in-depth/myanmar-rohingya-refugee-crisis-humanitarian-aid-bangladesh> (12/15/24)

¹²⁸ BBC News, *Myanmar: Who are the Arakan Rohingya Salvation Army?*, bbc.com <https://www.bbc.com/news/world-asia-41160679> (12/15/24)

¹²⁹ ACLED, *Myanmar: Conflict Update*, acleddata.com https://acleddata.com/2018/04/05/myanmar-conflict-update/#_ftn14 (12/15/24)

Gambar 2.2 Reruntuhan Rumah Milik Etnis Rohingya yang Terbakar di Desa Maungdaw¹³⁰



Selama 2018, krisis HAM dan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine semakin parah karena Militer dan aparat keamanan Myanmar terus terlibat dalam tindakan pelanggaran hak asasi terhadap etnis Muslim Rohingya.¹³¹ Pengungsi yang tiba di Bangladesh pada tahun 2018 melaporkan pelanggaran terus-menerus yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk pembunuhan, pembakaran, penghilangan paksa, pemerasan, pembatasan pergerakan, dan kekurangan makanan dan perawatan kesehatan. Selain itu, mereka melaporkan penculikan dan kekerasan seksual yang menimpa wanita dan anak perempuan di desa-desa dan di pos pemeriksaan selama perjalanan ke Bangladesh. Para pengungsi yang kembali ke Myanmar menghadapi penangkapan dan pembunuhan

¹³⁰ Tempo, *Sembilan temuan PBB pelanggaran HAM militer Myanmar atas Rohingya*, tempo.co, diakses dalam <https://www.tempo.co/internasional/9-temuan-pbb-pelanggaran-ham-militer-myanmar-atas-rohingya--1158216> (6/16/25)

¹³¹ Human Rights Watch, *Myanmar Events of 2018*, hrw.org <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/myanmar> (12/17/24)

oleh otoritas. Lebih dari 4.500 orang Rohingya masih tinggal di "tanah tak bertuan" di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Mereka sering dilecehkan oleh pejabat Myanmar dan diancam untuk menyeberang ke Bangladesh melalui pengeras suara.¹³²

Antara Januari dan Maret 2018, sedikitnya 34 desa di Myanmar hancur secara keseluruhan atau sebagian, menambah jumlah total desa yang hancur menjadi 392 dari Agustus 2017 hingga Maret 2018, sebagian besar karena kebakaran.¹³³ Sepanjang 2018, Myanmar mengatakan siap menerima pengungsi yang dipulangkan, tetapi tidak berusaha membuat kondisi pemulangan pengungsi aman. Dua jurnalis Reuters, Kyaw Soe Oo serta Wa Lone, ditetapkan hukuman penjara dalam waktu tujuh tahun setelah melaporkan peristiwa pembantaian yang dilakukan militer untuk etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada Desa Inn Din.¹³⁴ Pada 2018, Myanmar mendapat kecaman internasional atas kekejaman militernya terhadap Rohingya. Pada Juni, Uni Eropa dan Kanada memberikan sanksi kepada tujuh pejabat militer karena aktivitas mereka di Negara Bagian Rakhine.¹³⁵ Pada bulan Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keuangan dan perjalanan terhadap dua unit militer dan empat komandan pasukan keamanan.

Menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), tahun 2020 adalah tahun yang paling mematikan bagi pengungsi yang menyeberangi

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *Ibid.*,

¹³⁴ *Ibid.*,

¹³⁵ Retno Bintaro, *Tujuh jenderal Myanmar Dijatuhi Sanksi oleh Uni Eropa dan Kanada*, [kompas.id https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/27/tujuh-jenderal-myanmar-dijatuhi-sanksi-oleh-uni-eropa-dan-kanada](https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/27/tujuh-jenderal-myanmar-dijatuhi-sanksi-oleh-uni-eropa-dan-kanada) (12/17/24)

Teluk Benggala dan Laut Andaman.¹³⁶ Ini adalah rute laut populer bagi warga Rohingya untuk mencapai Asia Tenggara. UNHCR melaporkan bahwa sebagai bagian dari respons terhadap pandemi virus corona, banyak negara di Asia Tenggara memperketat perbatasan mereka, yang mengakibatkan banyak pengungsi terdampar di laut. UNHCR mendesak semua negara di kawasan itu untuk mencari dan menyelamatkan pengungsi yang mengalami kesulitan di laut dan membiarkan mereka turun ke tempat yang aman.¹³⁷ Myanmar menempati urutan ketiga di Asia Selatan dalam jumlah kasus COVID-19 di tahun 2020.¹³⁸ Di sisi lain, serangan militer terus terjadi. Di Rakhine terjadi konflik antara militer dan Arakan Army, kelompok bersenjata etnis Rakhine yang berjuang untuk kemerdekaan, yang menyebabkan gelombang kedua pandemi COVID-19. Karena gencatan senjata belum selesai maka konflik terus berlanjut.

Karena Tatmadaw melakukan kudeta untuk mengembalikan kekuasaan militer di Myanmar pada bulan Februari 2021, demokrasi yang dipimpin oleh NLD runtuh.¹³⁹ Kudeta diketuai oleh Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai panglima tertinggi Tatmadaw. Setelah kudeta, Myanmar terpecah menjadi ratusan kelompok etnis bersenjata kecil yang dibentuk untuk melawan junta, menjadikannya satu-satunya negara Asia dengan tingkat kekerasan internal yang ekstrem.¹⁴⁰ Adanya

¹³⁶ Aljazeera, *2020 was deadliest year ever forrohingya*, <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/20/rohingya-sea-journeys-un> (12/17/24)

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ ACLED, *CDT Spotlight: COVID-19 & Conflict in Myanmar*, <https://acleddata.com/2020/11/02/cdt-spotlight-covid-19-and-conflict-in-myanmar/> (12/18/24)

¹³⁹ Fortify Rights Report, *Genocide by Attrition*, diakses dalam <https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf> (1/1/25)

¹⁴⁰ Abdullah Alkhaja, *Myanmar's Forgotten People: A Humanitarian Perspective in 2024*, <https://trendsresearch.org/insight/myanmars-forgotten-people-a-humanitarian-> (12/14/24)

perekrutan secara paksa pemuda Rohingya di Myanmar dengan alasan bahwa mereka akan menerima bantuan makanan, gaji, dan kewarganegaraan jika mereka bergabung.

Konflik di Myanmar telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Tetapi setelah militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, telah terjadi perubahan signifikan. Menurut data ACLED, lebih dari 2.600 aktor non-negara tambahan telah terlibat dalam konflik di Myanmar sejak April 2021.¹⁴¹ Para penentang kudeta yang tidak memiliki opsi lain selain membalas dengan lebih keras telah mendirikan beberapa organisasi baru atau merevitalisasi organisasi lama. Kekerasan mencapai puncak ketika militer melakukan aksi lebih terorganisir dan sistematis, meliputi penangkapan, diskriminasi seksual, dan bahkan eksekusi terhadap para pengunjuk rasa.¹⁴²

Selama paruh pertama tahun 2022 di Myanmar terus berlangsung perlawanan terhadap kudeta militer yang terjadi. Penduduk sebagian besar negara telah memberontak aktif melawan pengambilalihan kekuasaannya oleh militer dan upaya mereka untuk mempertahankan kendali menggunakan kekerasan ekstrim tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dibandingkan dengan situasi pada paruh kedua tahun 2021, laju perjuangan bersenjata melawan rezim militer meningkat.¹⁴³

[perspective-in-2024/?srsltid=AfmBOopW2uREI9gkIm6B70HjNNIK741P47uKcEq-wDo1qXT1I3eIRieO](https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmars-spring-revolution-a-year-in-photos/) (12/17/24)

¹⁴¹Su Mon, *Between cooperation and competition: The struggle of resistance groups in Myanmar*, acleddata.com <https://acleddata.com/2024/11/26/between-cooperation-and-competition-the-struggle-of-resistance-groups-in-myanmar/#s1> (12/18/24)

¹⁴² Frontier, *Myanmar's Spring Revolution: a year in photos*, frontiermyanmar.net <https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmars-spring-revolution-a-year-in-photos/> (12/18/24)

¹⁴³ ACLED, *10 Conflicts to Worry About in 2022*, acleddata.com <https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/myanmar/mid-year-update/> (12/18/24)

Namun, demonstrasi menentang kudeta juga tetap berlanjut di sisi lainnya dari perspektif tersebut. Selama enam bulan pertama tahun 2022, pasukan pemerintah menargetkan warga sipil di seluruh Myanmar.¹⁴⁴ Sebagian besar kekerasan ini terdiri dari serangan langsung dengan senjata ringan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak ikut serta dalam demonstrasi. Warga sipil sering ditembak di pos-pos pemeriksaan, dipenjara, dan dibunuh setelah pertempuran di desa-desa, anak-anak juga menjadi sasaran.¹⁴⁵

Di daerah lain, terutama di negara bagian Rakhine, ketegangan antara militer Myanmar dan Liga Bersatu Arakan/Tentara Arakan (ULA/AA) semakin meningkat. Ini terjadi karena ULA/AA sukses meningkatkan kendalinya di beberapa wilayah di negara bagian itu. Selama bulan Juni dan Juli, berlangsung sejumlah insiden penangkapan dan penculikan sebagai bentuk respons antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Myanmar juga melaksanakan latihan laut di perairan Rakhine pada awal Juli sebagai bagian dari usaha memperkuat posisinya di tengah meningkatnya ketegangan.¹⁴⁶

Dalam serangan militer dari udara, sedikitnya 100 orang tewas. Desa di wilayah Sagaing adalah sasaran serangan.¹⁴⁷ Antara Februari 2021 dan Januari

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ Human Rights Council, *losing a generation how the military junta is devastating Myanmar's children and undermining Myanmar's future*, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc50crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-losing-generation> (12/18/24)

¹⁴⁶ RFA Burmese, *Tensions rise in Rakhine state after a five-day Myanmar naval drill*, rfa.org <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/tensions-rise-in-rakhine-state-after-a-five-day-naval-drill-07062022063402.html> (12/18/24)

¹⁴⁷ Ewelina U Ochab, *Myanmar Military Kills More Than 100 People In A Single Attack*, forbes.com <https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2023/04/12/myanmar-military-kills-more-than-100-people-in-a-single-attack/?sh=7afa16cc3393> (12/18/24)

2023, setidaknya 600 serangan dilakukan oleh militer, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Perang Angkatan Darat (ACLED).¹⁴⁸ Junta militer pada tahun 2022 telah menggunakan kekerasan diskriminatif untuk menargetkan warga sipil yang didakwa mendukung aksi anti kudeta, serta untuk melakukan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil di seluruh negeri.

Penjelasan yang diberikan oleh ACLED menunjukkan permasalahan di Myanmar tahun 2024 memiliki index level yang ekstrim dengan urutan kedua setelah Palestina.¹⁴⁹ Menduduki peringkat paling atas dalam kategori *most fragmented* yang berarti konflik yang terjadi di Myanmar melibatkan banyak pihak seperti militer, kelompok etnis bersenjata, kelompok oposisi lainnya. Dalam kategori jumlah korban akibat konflik, Myanmar mendapat peringkat ketiga. Lalu, peringkat keempat dalam kategori *most dangerous to civilians*. Peningkatan serangan udara militer di Myanmar tahun 2024 juga berkontribusi pada tingginya indeks pada beberapa kategori yang telah disebutkan. Selain itu, ACLED juga memberikan data dengan adanya 13.057 kejadian kekerasan politik, 19.874 korban jiwa yang dilaporkan akibat kekerasan politik, 3.694 kejadian penyerangan yang menargetkan warga sipil.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Widodo Irianto, *Bom Militer Myanmar Tewaskan Sekitar 100 Orang Warganya Sendiri*, timesindonesia.co.id <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/451697/bom-militer-myanmar-tewaskan-sekitar-100-orang-warganya-sendiri> (12/18/24)

¹⁴⁹ ACLED, *Myanmar: 2024 Conflict Index Infographic*, acleddata.com <https://acleddata.com/2024/12/06/myanmar-2024-conflict-index-infographic/> (12/18/24)

¹⁵⁰ *Ibid.*,

2.3 Gambaran Pengungsi Rohingya di Indonesia

Gelombang awal kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia terjadi pada tahun 2012. Adanya peningkatan kekerasan di Myanmar yang memaksakan mereka dalam hal memperoleh jaminan perlindungan di negara lain. Kondisi saat tiba di Indonesia sangat memprihatinkan karena mereka terapung berhari-hari di lautan, tidak memiliki persediaan yang cukup saat melakukan perjalanan menuju Indonesia, adanya kekerasan di dalam kapal dan juga kondisi kapal yang tidak layak pakai.¹⁵² Seringkali, pengungsi Rohingya datang melalui pelabuhan atau pantai yang berbatasan dengan negara lain. Misalnya, pantai di Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau. Menurut salah satu penelitian, Aceh telah menjadi tempat mendarat bagi pengungsi Rohingya sejak tahun 2012.¹⁵³

¹⁵² BBC News Indonesia, *warga burma terdampar ditampung kantorimigrasiaceh*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120202_manusiaperahuburmadiaceh (12/18/24)

¹⁵³ Adwani, dkk, *THE RESPONSIBILITY IN PROTECTING THEROHINGYA REFUGEES IN ACEH PROVINCE, INDONESIA: AN INTERNATIONAL REFUGEES LAW PERSPECTIVE*, IJUM Law Journal, vol. 29, no. 2, hal. 2. [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(S2\).677](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(S2).677)

Gambar 2.3 Etnis Rohingya Mendarat di Aceh¹⁵⁴



Pada 10 Mei 2015, Indonesia dikejutkan dengan datangnya kapal-kapal Rohingya di Aceh. Gelombang pertama terdapat 4 kapal yang ditarik ke daratan oleh nelayan di Aceh karena kehabisan bahan bakar, dan sebanyak 50 wanita dirawat di rumah sakit. Kejadian serupa terjadi lagi tanggal 15 Mei dan mereka ditampung sementara di mushola setempat lalu dipindahkan ke Kota Langsa.¹⁵⁵ Gelombang ini merupakan rentetan dari tahun 2012. Hasil dari wawancara oleh UNHCR ke beberapa pengungsi Rohingya yang tiba di Bulan Mei, rata-rata waktu yang mereka habiskan mencapai 76 hari di lautan.¹⁵⁶

Pernyataan dari pengungsi di Aceh, Muhammad Yusuf, menjelaskan perjalanannya sebelum mendarat di Aceh. Kapal yang ia tumpangi mengalami

¹⁵⁴ The Guardian, *online hate campaign turnin Indonesian against Rohingya refugee*, diakses dalam, <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/18/the-online-hate-campaign-turning-indonesians-against-rohingya-refugees> (6/16/25)

¹⁵⁵ Zulkarnain & Indra Kusumawardhana, *Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015*, Jurnal HAM, vol. 11 no. 1 hal. 68 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.67-83> (12/18/24)

¹⁵⁶ Refworld, *South-east Asia: Mixed Maritime Movements*, unhcr.org, hal. 5 <https://webarchive.archive.unhcr.org/20230518211553/https://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html> (12/19/24)

kerusakan pada mesinnya, hanya 4 hari sekali mereka makan karena tidak memiliki persediaan yang cukup, dan mereka minum menggunakan air laut. mereka berada di laut selam 4,5 bulan sebelum nelayan Aceh membawa mereka ke daratan.¹⁵⁷ Kendala dalam berbicara dengan petugas UNHCR maupun aktor-aktor lain secara langsung karena mereka tidak dapat berbahasa inggris.

Kedatangan pengungsi Rohingya sempat mendapat tolakan dari warga lokal karena mereka menganggap pengungsi tersebut sebagai ancaman. Terdapat pandangan di masyarakat yang menyatakan bahwa pengungsi Rohingya berpotensi menimbulkan kekhawatiran, di antaranya dianggap dapat merebut wilayah Aceh seperti yang terjadi antara Israel-Palestina, menambah beban anggaran negara, dan menuntut pemenuhan sarana pengungsian secara sesuai. Mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah imigran ilegal yang masuk secara tidak resmi tanpa visa dan identitas yang jelas.¹⁵⁸

Ada banyak cerita kebencian dan kecemburuan di kalangan masyarakat, seperti kebencian terhadap pengungsi Rohingya yang tidak bekerja tetapi menerima tunjangan, dan keyakinan bahwa tunjangan tersebut berasal dari pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, banyak masyarakat Indonesia masih menghadapi

¹⁵⁷Detik News, *Kisah Kelam Rohingya yang Terdampar di Aceh*, news.detik.com. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5091177/kisahkelam-pengungsi-rohingya-yang-terdampar-di-aceh> (1/9/25)

¹⁵⁸ BBC News Indonesia, *rohingya di sidoarjo, rohingya minta tanah, menlu retno usir rohingya – bagaimana narasi kebencian danhoaks bekerja menyudutkan etnisRohingya*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03y7n3k12lo> (1/10/25)

masalah.¹⁵⁹ Tunjangan tersebut sebenarnya berasal dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Berita-berita hoax tersebut menyebabkan kebencian atau kecemburuan bagi masyarakat lokal dan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di Aceh untuk men deportasi pengungsi Rohingya. Alasan mereka melakukan demo tersebut dikarenakan tingkah laku para pengungsi yang dinilai melanggar adat disana.¹⁶⁰ Beberapa dari mereka ada yang kabur dari kamp pengungsian, mogok makan, protes meminta tempat tinggal yang lebih bagus, dan lain lain.¹⁶¹

Alasan lain yang diberikan oleh Pemimpin Desa Lapang Barat yang berada di Kabupaten Bireuen menyatakan penolakan untuk menerima mereka karena tidak ada tempat untuk menampung bukan masalah logistik. Menurutnya, karena wilayah tersebut digunakan untuk nelayan utama, kehadiran pengungsi dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat.¹⁶² Perilaku ini sangat berbeda dari tindakan kebaikan sebelumnya terhadap pengungsi Rohingya yang tiba di perairan Aceh, yang membuat penduduk setempat dihormati secara internasional. Nelayan

¹⁵⁹ Aris Hariyanto, *pengungsi Rohingya di Sidoarjo Mengeluh Uang Saku 1 Juta Per Bulan Kurang, Warganet Kesal*, diakses dalam <https://radarsemarang.jawapos.com/nasional/723452001/pengungsi-rohingya-di-sidoarjo-mengeluh-uang-saku-1-juta-per-bulan-kurang-warganet-kesal-ya-pasti-gak-cukup-kalo-buat-beli-pulau> (1/10/25)

¹⁶⁰ Detik News, *mengapa pengungsi rohingya ditolak warga aceh*, <https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-aceh-ini-penjelasan> (1/11/25)

¹⁶¹ BBC News Indonesia, *Pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa di Aceh, menyisakan trauma dan ketakutan – 'Kami kira akan mati di sini'*, [bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o) (1/9/25)

¹⁶² BBC News Indonesia, *'Rohingya negara mana?' Dan tujuh hal mengenai Rohingya*, [bbc.com , https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo) (1/10/25)

diwajibkan untuk membantu siapa pun yang mengalami kesulitan di laut, menurut hukum adat maritim Aceh. Dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan, lembaga tradisional Panglima Laot memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan maritim. Selain itu, tradisi Aceh yang disebut "peumulia jamee", atau menghormati tamu, menunjukkan budaya lokal yang menghargai dan menyambut tamu.¹⁶³

Contoh lain yang buruk merupakan isu pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia yang dilaporkan, bersama dengan pembuangan bantuan masyarakat ke laut, di antara tindakan tidak dapat diterima lainnya. Selain melanggar prinsip dasar yang diagungkan oleh agama, tindakan tersebut juga melanggar peraturan lokal. Masyarakat setempat di Aceh tentu saja menanggapi perilaku tersebut dengan buruk.¹⁶⁴

Pengalaman lain juga dibagikan salah satu pengungsi Rohingya, ia menyatakan bahwasannya kapal yang ditumpanginya sempat mendapat tolakan dari warga Aceh sebanyak 2 kali. Mereka mendapat perbekalan dari masyarakat Aceh sebelum dilepas kembali ke laut. Namun, perbekalan tersebut tentu tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kondisi kesehatan anak Yasmin sudah buruk,

¹⁶³Nino Viartasiwi & Antje Missbach, *Rohingya refugees facing a hostile reception in Aceh*, newmandala.org, <https://www.newmandala.org/rohingya-refugees-facing-a-hostile-reception-in-aceh/> (1/10/25)

¹⁶⁴ Agus Setiadi, *Perkosa Anak di Kamp Penampungan Pidie, WN Rohingya Ditangkap*, detik.com, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6804957/perkosa-anak-di-kamp-penampungan-pidie-wn-rohingya-ditangkap> (1/10/25)

dengan kondisi seperti itu Yasmin terpaksa memberikan air laut sebagai asupan anaknya. Tak lama anak tersebut meninggal, dan ia larung di laut.¹⁶⁵

Di Aceh, penerimaan awal pengungsi Rohingya dan bantuan warga berdasarkan ikatan solidaritas keagamaan yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan serta semangat persaudaraan antar-pemeluk agama. Peningkatan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia menyebabkan perubahan sikap masyarakat, dari yang semula bersifat empatik menjadi penuh kekhawatiran terhadap dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya daerah, ketidakpastian integrasi pengungsi, serta potensi risiko jangka panjang yang mungkin timbul.¹⁶⁶ Ditambah dengan adanya perlakuan buruk dari beberapa pengungsi Rohingya yang menambah rasa benci terhadap mereka.

Banyaknya gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dinilai ada kaitannya dengan aktivitas penyelundupan manusia yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan keadaan Rohingya. Zakaria, salah satu pengungsi dari Rohingya menjelaskan ia rela membayar sebanyak 20 juta demi bertemu dengan anak istri di Aceh yang sudah berpisah bertahun-tahun. Sekitar 112.500 warga Rohingya menyeberangi Laut Andaman dengan bantuan penyelundup antara tahun 2012 dan 2015. Setelah jaringan penyelundup dihapus di tahun 2015, sekitar 8.000 orang Rohingya ditelantarkan di laut selama beberapa minggu. Ketika Malaysia dan

¹⁶⁵ BBC News Indonesia, *Pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa di Aceh, menyisakan trauma dan ketakutan – ‘Kami kira akan mati di sini’*, [bbc.com, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o) (1/10/25)

¹⁶⁶ Subria Mamis, dkk., *Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis*, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, vol. 24, no. 2, h. 142. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/21384/6758>

Indonesia mengizinkan kapal-kapal tersebut berlabuh pada tahun 2015, krisis laut Andaman akhirnya berakhir.¹⁶⁷

Karena kondisi kehidupan yang sulit, ketidakstabilan, dan status kewarganegaraan yang mereka miliki di negara asal mereka, pengungsi Rohingya sering menggunakan jasa penyelundup untuk melarikan diri dari Myanmar atau negara tetangga ke tempat perlindungan. Penyelundupan dapat berkembang menjadi perdagangan manusia.¹⁶⁸

Kegiatan penyelundupan tersebut menawarkan mereka menuju Malaysia atau Indonesia, dengan rumor yang disebarkan oleh para penyelundup bahwasannya para pengungsi akan mendapatkan pemukiman kembali di dua negara tersebut. Pernyataan tidak benar itu dilontarkan supaya banyak dari pengungsi Rohingya yang menggunakan jasa ilegal tersebut. Salah satu pengungsi di Aceh menjelaskan bahwa kegiatan penyelundupan ini dilakukan oleh pihak yang terlatih dan mereka dapat mengelabui patroli di laut. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak penyelundupan yaitu mereka akan menggunakan perahu kecil untuk melewati perbatasan maritim antara Bangladesh dengan dan Myanmar. Lalu, mereka dibawa menuju ke tengah laut untuk dipindahkan ke kapal yang lebih besar. Hasil dari riset yang dilakukan oleh Arakan Project, perjalanan menuju Indonesia

¹⁶⁷ Nino Viartasiwi & Antje Missbach., *Op Cit.*,

¹⁶⁸ Dhimas R. Hartanto, *Implikasi dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya di Daratan Indonesia Terhadap Keamanan Maritim: Studi Kasus dan Analisis Potensial Ancaman*, Sainlara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim, vol. 8, no. 2, hal. 22. <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i2.310>

lebih murah dari sebelumnya. Kapal-kapal yang digunakan pihak penyelundup merupakan kapal bekas dari nelayan Bangladesh.¹⁶⁹

Beberapa dari mereka berlayar dari penampungan Bangladesh menuju ke Malaysia karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Namun pihak Malaysia tidak mengizinkan mereka untuk mendarat di pantai Malaysia, alhasil mereka didorong kembali ke laut dan berlayar menuju Indonesia. Disaat kondisi kapal mereka sudah tidak layak pakai, beberapa dari mereka akan berenang menuju kapal pengungsi Rohingya lain yang mereka temui di laut sebagai upaya mempertahankan hidup mereka. Bagi mereka yang tidak bisa berenang, hanya berdoa mengharapkan kapal yang mereka tumpangi segera mendarat dimana saja.¹⁷⁰

Para pengungsi Rohingya meninggalkan kamp pengungsian Bangladesh karena kondisi kehidupan yang tidak layak, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta populasi yang meningkat yang menambah beban hidup mereka. Selain itu, terutama keluarga yang memiliki anak-anak, mencari perlindungan di tempat lain karena tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti penculikan anak dan pembunuhan. Tujuan utama mereka adalah untuk memperbaiki kehidupan mereka di negara-negara yang diharapkan seperti Malaysia

¹⁶⁹ Nicky Aulia Widadio dan Hanna Samosir, *Gelombang pengungsi Rohingya di Aceh, 'Para penyelundup mengatur rute perjalanan untuk mendarat di Indonesia'*, [bbc.com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c212p0j40xyo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c212p0j40xyo) (1/10/25)

¹⁷⁰ Aditya Jaya Iswara, *Cerita Penderitaan Rohingya, Menahan Haus dan Lapar Berhari-hari di Laut*, [kompas.com. https://www.kompas.com/global/read/2023/01/12/181500770/cerita-penderitaan-rohingya-menahan-haus-dan-lapar-berhari-hari-di-laut-?page=all](https://www.kompas.com/global/read/2023/01/12/181500770/cerita-penderitaan-rohingya-menahan-haus-dan-lapar-berhari-hari-di-laut-?page=all) (1/9/25)

dan Indonesia, dengan bantuan keuangan dari keluarga yang tinggal di negara sebelumnya.¹⁷¹

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa banyaknya pengungsi Rohingya yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.¹⁷² Seorang warga negara Bangladesh yang mengaku sebagai penyelundup ditangkap oleh polisi Pidie. Setelah penyelidikan, penyelundup tersebut meraup keuntungan hingga miliaran rupiah, dan biaya perjalanan untuk setiap pengungsi adalah Rp14 juta bagi orang dewasa dan Rp7 juta bagi anak-anak.¹⁷³ Indonesia menjadi negara transit bagi pengungsi Rohingya yang gagal mengawasi dan menjaga kedatangan imigran gelap. Sebagian besar imigran Rohingya masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Infrastruktur, layanan sosial, dan sumber daya yang ada di Aceh telah dipengaruhi oleh pengungsi Rohingya. Indonesia harus memberikan bantuan makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan jika menerima ribuan imigran Rohingya. Hal ini menimbulkan beban keuangan bagi sesama dan masyarakat sekitar.

Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 serta protokol 1964, akan tetapi tetap menerima pengungsi yang tiba di Indonesia. Dengan itu, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menangani pengungsi Rohingya lebih lanjut. Indonesia berkontribusi pada penyediaan tempat penampungan juga menunjukkan fasilitas yang diperlukan dari pengungsi Rohingya sambil menunggu proses lebih

¹⁷¹Hotli Simanjuntak, *Kisah Perjalanan Berbahaya Keluarga Rohingya*, digdata.id, <https://digdata.id/baca/kisah-perjalanan-berbahaya-keluarga-rohingya/> (1/9/25)

¹⁷² Humas, *Ungkap Dugaan TPPO Terkait Pengungsi Rohingya, Presiden: Akan Ditindak Tegas*, setkab.go.id, <https://setkab.go.id/ungkap-dugaan-tppo-terkait-pengungsi-rohingya-presiden-akan-ditindak-tegas/> (1/10/25)

¹⁷³ Erika Erilia, *Fakta Terbaru Pengungsi Rohingya di Aceh, Benarkah Minta Pulau?*, tirto.id, <https://tirto.id/fakta-terbaru-pengungsi-rohingya-di-aceh-benarkah-minta-pulau-gTa7> (1/10/25)

lanjut yang dilakukan oleh UNHCR. Indonesia mau menerima mereka sebagai bentuk implementasi UUD 1945. Pada pembukaan UUD 45 alinea ke-4 dicantumkan mendorong Indonesia untuk berkontribusi menjaga perdamaian.¹⁷⁴ Pasal 28A-28J dalam UUD 1945 dijelaskan terkait dengan Hak Asasi Manusia.¹⁷⁵

Pancasila sila kedua: “kemanusiaan yang adil dan beradab”, mendorong Indonesia bersikap humanis terhadap pengungsi dipaksa untuk meninggalkan tanah airnya karena konflik dan kekerasan. Peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 menyampaikan tata cara dengan tujuan melindungi pengungsi luar Indonesia yang terdapat pada wilayah Indonesia dengan melibatkan kerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional diantaranya UNHCR, dan masyarakat sipil (LSM).¹⁷⁶ Adanya Peraturan Presiden tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengambil tanggung jawab moral dan politik untuk membantu pengungsi Rohingya yang sejalan pada prinsip-prinsip HAM secara universal dan komitmennya terhadap perdamaian dunia. Komitmen Indonesia dalam HAM yang tercantum pada TAP MPR No.XVII/MPR/1988. Ketetapan tersebut menegaskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),

¹⁷⁴ The Office of the Registrar and the Secretariat General Of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*, hal. 4, diakses dalam <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45%20eng.pdf> (1/5/25)

¹⁷⁵ Ibid., hal. 26-30

¹⁷⁶ Database Peraturan, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016> (1/2/25)

seperti pada Pasal 24 DUHAM disebutkan bahwa "setiap individu memiliki hak dalam memperoleh suaka guna mendapatkan perlindungan politik dari negara yang lainnya."¹⁷⁷

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah krisisnya etnis Rohingya di Myanmar, permulaan kedatangan pengungsi Rohingya pada Indonesia, serta gambaran pengungsi Rohingya di Indonesia. Selanjutnya, pada bab 3 akan dijelaskan terkait gambaran UNHCR dan kerjasamanya dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia.



¹⁷⁷Komnas HAM, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998*, diakses dalam [https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-\\$7XDJK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-$7XDJK.pdf) (1/2/25)